



# GEJALA ATAU ISU-ISU DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI KONTEMPORER

Kolonel PNB. Amrizal Mansur, M.Si

## 1. Pendahuluan

Fenomena internasional kontemporer ditandai dengan semakin terintegrasinya segala aspek kehidupan manusia baik secara politik, ekonomi, sosial dan bahkan budaya dalam kerangka globalisasi. Integrasi yang mengarah pada kondisi state borderless tersebut sedikit banyak telah mengurangi otoritas negara sehingga negara bukan lagi aktor dominan dalam *global village*. Globalisasi memunculkan bentuk hubungan *interdependence* dan *interconnection* antar negara dan aktor-aktor lain non-negara. Akibatnya, isu-isu global kontemporer tidak lagi berputar pada permasalahan perang dan keamanan internasional semata, melainkan juga isu-isu non-konvensional lain seperti *terorisme*, *global warming*, *transational crime*, *global poverty* dan sebagainya yang tentunya menuntut peran serta semua aktor untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang gejala dan isu yang terjadi dan dihubungkan dengan teori kontemporer maka yang menjadi rujukan adalah materi pelajaran mata kuliah: Teori Politik Klasik dan Kontemporer. Dalam teori kontemporer masalah pertumbuhan ekonomi, demokrasi, stabilitas politik dan globalisasi merupakan hal yang paling mendominasi dan mendapatkan prioritas untuk dijadikan isu utama. Dalam perkembangannya selanjutnya teori kontemporer merujuk ilmu hubungan internasional karena dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan sejarah. Selain itu, ada beberapa hal penting di dalam dinamika

ilmu hubungan internasional yaitu pertama, aktor (pelaku yang berperan dalam *policy making*), dan kedua, isu (isu-isu yang mempengaruhi hubungan internasional).

## 2. Gejala dan Isu yang Berhubungan dengan teori Kontemporer

Dalam perkembangannya, Hubungan Internasional suatu isu memiliki empat dinamika yaitu: pertama, militer strategis dan diplomasi; kedua, politik ekonomi dan organisasi internasional; ketiga, keamanan nasional yang merupakan harga mati bagi sebuah bangsa. contohnya adalah perbatasan tradisional dari sebuah negara. Keempat, yaitu studi konflik dan resolusi yang menjadi bagian dari disiplin ilmu Hubungan Internasional, dan terakhir adalah proses. Proses dalam ilmu hubungan internasional menitikberatkan pada rumusan 3C + 1I yaitu; *cooperation, competition, conflict* and *integration*, dimana empat bagian tersebut melibatkan aktor, isu dan proses. Sedangkan pada pelajaran mata kuliah Teori Politik Klasik dan Kontemporer terdapat 4 gejala atau isu yang meliputinya yaitu:

### a. Pertumbuhan Ekonomi.

Isu ekonomi dan perdagangan internasional merupakan isu yang berjalan paling intens, dinamis dan paling menyita perhatian. Fenomena globalisasi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kegiatan ekonomi internasional baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Globalisasi ekonomi dan perdagangan ditopang oleh banyak faktor antara lain kemajuan teknologi informasi, transportasi, komunikasi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu yang relatif singkat. Dampaknya, ekonomi antar negara menjadi semakin bergantung satu sama lain dalam lingkup global. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi negara lain. Oleh

karenanya, suatu negara tidak lagi dapat mengambil kebijakan nasional tanpa mempertimbangkan lingkungan ekonomi global.

ASEAN *Community* atau dalam bidang ekonomi lebih dikenal sebagai ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN demi terwujudnya ekonomi yang terintegrasi. Negara-negara yang tergabung dalam AEC memberlakukan sistem *single market* atau pasar tunggal terbuka untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja. AEC direncanakan terbentuk pada tahun 2015.

Dengan diberlakukannya AEC tiap-tiap negara akan terintegrasi dalam bidang produksi untuk meningkatkan efisiensi. Kerjasama pelaku produksi antar negara akan semakin berkembang untuk menciptakan efisiensi dengan nilai tinggi. AEC akan meningkatkan nilai kompetitif negara-negara ASEAN untuk menyediakan produk yang memiliki kualitas tinggi. Produk berkualitas tinggi akan menghimpit yang berkualitas rendah dan lama kelamaan akan ditinggalkan konsumen. Tidak semua potensi dari kesepuluh negara yang tergabung dalam AEC sama, Indonesia menempati posisi yang dominan. Indonesia dominan dalam hal populasi (60% populasi ASEAN adalah warga Indonesia), luas wilayah, dan pasar yang besar. Sesuai dengan tema yang diangkat, posisi tersebut dapat menjadi masalah atau tantangan bangsa.

Saat ini setidaknya terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang perlu dibenahi Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari defisitnya neraca perdagangan ekspor dan impor yang dimulai sejak tahun 2007. Defisit tersebut ditengarai oleh permasalahan ekonomi regional di Indonesia. Komunitas ekspor Indonesia masih bergantung pada barang mentah dan setengah jadi, sedangkan barang impor yang masuk ke Indonesia rata-

rata produk akhir atau produk jadi. Masalah berikutnya, perdagangan jasa antara Indonesia dan ASEAN juga masih defisit. Sektor transportasi bisa dibilang sektor yang mendorong defisit. Misalnya, Indonesia melakukan ekspor, tapi jasa yang digunakan untuk kegiatan ekspor masih menggunakan kapal asing.

Pada saat AEC telah terbentuk, persaingan tenaga kerja di wilayah ASEAN akan lebih luas. Maka, tuntutan akan SDM yang berkualitas dalam segala hal menjadi suatu kewajiban baru. Menurut data, hampir 67% atau 2/3 penduduk Indonesia berpendidikan akhir SMP ke bawah. Jauh dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina yang 80% lulusannya berpendidikan akhir setingkat SMA dan pendidikan tinggi. Dengan demikian gejala ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

ASEAN *Community* tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian, dengan terbentuknya pasar yang terbuka juga akan mempengaruhi politik dan sosial-budaya negara masing-masing. Untuk itu dibentuk komunitas ASEAN *Political-Security Community* dan ASEAN *Socio-cultural Community*. Komunitas Politik dan Keamanan diharapkan bisa mengatasi segala permasalahan yang menyangkut masalah politik dan keamanan di negara ASEAN. Contoh, kasus perselisihan tapal batas antara Indonesia dengan Malaysia seperti blok ambalat yang selalu diperselisihkan. Komunitas Sosial dan Budaya diharapkan akan menjawab permasalahan yang ada. Misalnya, kasus klaim kebudayaan suatu bangsa antar negara ASEAN, hal tersebut akan diselesaikan dengan ASEAN *Socio-cultural Community*. Hal ini bisa menjadi isu yang sensitif jika tidak diselesaikan dengan baik.

Membayangkan Komunitas ASEAN 2015, banyak negara anggota yang bersikap skeptisisme. Hal ini cukup beralasan.

Pertama, secara ekonomi kawasan ASEAN mengandung ketimpangan dan disparitas satu sama lain. Ada negara-negara dengan ekonomi sudah sangat atau relatif sangat baik seperti Singapura dan Malaysia, atau katagori baik seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Tetapi di tengah membaiknya kondisi perekonomian, masih banyak warga masyarakat sanagat miskin seperti di Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos dan Timur Leste.

Kedua, pertumbuhan demokrasi di kawasan ASEAN juga terlihat senjang. Terdapat negara-negara yang menerapkan 'demokrasi liberal' seperti Indonesia dan Filipina. Pada pihak lain, meski juga menerapkan demokrasi, ada negara-negara yang pada dasarnya menerapkan totalitarianisme seperti Singapura, Thailand, atau bahkan Malaysia. Lalu juga ada negara yang masih bergulat dalam proses transisi paling awal menuju demokrasi seperti Myanmar. Di tengah keragaman politik itu, juga masih sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, kesenjangan juga terkait dengan posisi dan hubungan antara agama dan negara. Ada negara yang memiliki agama resmi seperti Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga umatnya mendapat perlakuan khusus dari negara dengan mengorbankan pemeluk agama minoritas. Tetapi, juga negara yang tidak memiliki agama resmi, meski mayoritas penduduk masing-masing negara berasal dari umat beragama tertentu seperti Indonesia, Filipina, atau Thailand. Karena itu, di negara seperti Indonesia, umat beragama pada dasarnya independen vis-a-vis negara.

Di tengah kesenjangan dan disparitas ini, tiap negara ASEAN tidak bisa membantu dalam isu-isu yang dianggap sensitif menyangkut politik dan HAM, misalnya. Hambatan itu berasal dari prinsip dasar ASEAN tentang '*non-interference*', tidak campur tangan dalam urusan negara anggota lain. Prinsip ini

bertumpah tindih dengan prinsip kedaulatan masing-masing negara yang hampir tidak memungkinkan bagi negara anggota lain untuk 'membantu' negara anggota lain dalam penyelesaian masalah dalam negeri yang mereka hadapi. Bagaimanapun Komunitas ASEAN 2015 tetap harus diantisipasi, karena gejala dan isu ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya Indonesia yang merupakan pasar terbesar secara ekonomi, sosial-budaya, dan agama.

#### b. Stabilitas Politik

Stabilitas politik suatu negara adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam kelanjutan pembangunan suatu bangsa. Fenomena radikalisme Islam, terorisme, dan isu yang muncul menjelang Pemilu Pilpres cukup mengejutkan dan mulai mengoyahkan stabilitas politik dalam negeri. Dalam perkembangannya, hal yang paling sensasional adalah bahwa mayoritas tersangka kaum radikal dan teroris adalah para pemuda pedesaan. Memang, sentimen keagamaan bisa muncul dalam konteks-konteks tertentu bila bersentuhan dengan hal-hal sensitif seperti isu Ahmadiyah yang dianggap sesat, isu Kristenisasi dan juga isu Palestina dan hegemoni Amerika. Radikalisme agama (Islam) sebetulnya juga bukan hal yang baru di masyarakat. Takashi Siraishi (1990) membuktikan bahwa radikalisme Islam cukup marak di era pergerakan Indonesia seperti munculnya gerakan Serikat Islam di Surakarta.

Pada zaman modern atau Kontemporer saat ini, kemunculan perkembangan politik di era modern diawali dengan munculnya pendekatan *post-behavioralisme* sebagai kritik terhadap pendekatan klasik maupun *behavioralisme*. Post behavioralisme (seperti yang diungkapkan oleh David Easton) membawa gagasan baru bahwa dalam pergumulan ilmu politik tidak hanya berkutat di perpustakaan dengan menihilkan fakta-fakta empiris-aktual. Penelitian ilmu politik harus memberi sumbangsih terhadap masyarakat yang saat itu carut-

marut karena adanya manuver-manuver yang mengakibatkan peperangan (contoh: perang Amerika dengan Vietnam).

Sejarah juga mencatat bahwa gerakan Islam radikal seperti Sarekat Islam (SI) pada masa pergerakan juga diawali dengan masalah ekonomi dan sosial ketika para pedagang batik Solo berhadapan dengan dominasi Cina dalam perdagangan batik. Masalah sosial-ekonomi yang dihadapi generasi muda kemudian dipandang dengan perspektif kapitalisme dan hegemoni Barat yang dilegitimasi oleh ajaran Islam. Akhirnya, yang terjadi adalah ikon atau simbol-simbol kapitalisme dan hegemoni Barat dihancurkan. Dengan perspektif James Scott (1985) dalam *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, kita bisa melihat bahwa bom-bom di Indonesia itulah yang bisa dilakukan oleh orang-orang itu sebagai perlawanan mereka terhadap hegemoni Barat (Amerika) karena mereka tidak bisa langsung menyerang Amerika

Isu ini juga cukup agitatif dalam memprovokasi massa baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun, tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang relatif rendah sering membuat propaganda itu mengalami eskalasi berlebih hingga tingkat radikalisme. Walaupun tidak bisa dipukul rata menjadi asumsi umum, namun menarik untuk dikaji bahwa ketika permasalahan bersentuhan dengan masalah-masalah sensitif seperti isu kristenisasi maka paham radikalisme bermunculan. Kasus kerusuhan bernuansa agama pada tahun 1996 di Situbondo dan Tasikmalaya yang menyebabkan pembakaran puluhan gereja sehingga tak ayal lagi Franz Magnis Suseno secara sarkastis mengatakan bahwa "Indonesia adalah juara dunia dalam hal merusak dan membakar tempat-tempat ibadah" (Sueady, 1993: 8).

Hal yang sama juga terjadi sekitar isu Ahmadiyah atau Syiah. Banyak kasus kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah terjadi seperti di Cikeusik Banten (2011), Bogor (2011), Cianjur (2012),



dan juga terhadap pengikut Syiah di Sampang Madura (2012). Itu semua semakin menambah daftar panjang kekerasan horisontal masyarakat Indonesia yang bernuansa agama. Hal ini jelas menodai keberagaman masyarakat (pedesaan) Indonesia yang selama ini dikenal sebagai santun dan ramah. Terakhir, berbagai kasus radikalisme agama juga melibatkan masyarakat pedesaan. Radikalisme agama yang menjurus pada terorisme sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan seperti di Jakarta, Surabaya, dan Solo yang sangat mengancam pada stabilitas politik di Indonesia.

Ketika orang-orang Amerika bersuka-cita atas kematian Osama bin Laden di Pakistan tahun 2011, umat Islam Indonesia tidak menunjukkan sikapnya dengan tegas (ambigu) apakah harus bersuka-cita atau berduka. Ini menyiratkan bahwa umat Islam Indonesia secara umum menganggap bahwa hegemoni Amerika telah banyak menimbulkan penolakan dan bahkan kebencian karena merugikan umat Islam dunia. Jadi, sikap anti terhadap hegemoni Barat cukup merata di Indonesia dan ini berpotensi terhadap munculnya radikalisme yang berdampak pada stabilitas politik di dalam negeri. Selain itu, Isu kristenisasi juga cukup sensitif memicu munculnya radikalisme di pedesaan. Isu kristenisasi sering kali muncul di masyarakat dalam bentuk selebaran gelap atau isu pendirian gereja dalam komunitas umat Islam.

### c. Globalisasi

Isu globalisasi dapat dilihat pada hubungan internasional yang terjadi pada negara dunia ketiga. Berbagai reaksi terhadap globalisasi muncul sejalan dengan semakin kencangnya arus globalisasi. Secara kasat mata dapat kita lihat bahwa hampir semua pertemuan lembaga-lembaga globalisasi seperti pertemuan WTO dan G7 selalu diwarnai dengan aksi demo kelompok anti-globalisasi. Di tengah euphoria globalisasi, ada sejumlah bagian orang yang tersingkir.

Secara umum, ada tiga reaksi terhadap globalisasi yaitu: pertama, *celebration* yaitu mereka yang merayakan globalisasi antara lain kaum ekonom neoliberal yang menganggap bahwa pasar bebas yang diciptakan globalisasi merupakan pembawa kesejahteraan, kebebasan, demokrasi dan kedamaian sehingga globalisasi dianggap sebagai win-win skenario bagi semua. Orang-orang ini adalah pemilik modal perusahaan multinasional, media massa dan kelompok *World Economic Forum* (meliputi IMF, WTO, the World Bank). Dengan kata lain, kelompok ini adalah kaum hiperglobalis yang menyebabkan kemiskinan bagi negara berkembang.

Dalam pemahaman umum, globalisasi dapat diartikan sebagai proses percepatan lebih mendalam dan lebih meluas dalam semua aspek kehidupan di seluruh dunia meliputi interaksi, aktifitas dan penggunaan kekuasaan. Sebagai sebuah proses, fenomena globalisasi tidak dapat dihindarkan dan *irreversible* (tidak dapat diputar ulang) sehingga dapat digambarkan sebagai proses linier dalam kehidupan. Sebagai proses ilmiah, maka tidak ada aktor yang menggerakkan globalisasi (*no body in charge, no body responsible*). Karenanya, globalisasi bersifat *self-regulating*. Adapun karakter globalisasi antara lain:

- a. Berkaitan dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi transnasional.
- b. Berkaitan dengan akumulasi kapital, investasi, keuangan dan perdagangan global.
- c. Berkaitan dengan kemiskinan, migrasi, pertukaran nilai-nilai budaya dan ide transnasional.

Fenomena globalisasi di negara dunia ketiga tidak beda dengan kondisi kolonialisasi negara-negara Eropa pada abad 16 hingga abad 19. Bedanya, bila dulu kolonialisasi dibawa oleh institusi negara, maka kolonialisasi saat ini dibawa melalui instrumen perusahaan multinasional dengan justifikasi globalisasi. Akibatnya, muncul pandangan bahwa globalisasi sebenarnya dibawa dan dipaksakan oleh negara-negara maju

padahal sebenarnya negara-negara dunia ketiga belum siap menghadapi kondisi globalisasi. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa globalisasi bukanlah suatu proses melainkan suatu proyek kapitalisme.

Sebagai suatu proyek, maka globalisasi bukanlah suatu keniscayaan, melainkan suatu hasil keputusan politik. Perspektif transnasional menganggap bahwa globalisasi adalah produk dari aktor dan gerakan sosial transnasional seperti G7, IMF, The World Bank, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Secara ekstrim, kaum radikal menganggap bahwa globalisasi adalah produk dari negara adidaya dunia yaitu Amerika Serikat. Indikasinya, Amerika Serikat adalah negara yang paling antusias mendorong bergulirnya globalisasi dan paling banyak menikmati keuntungan dari globalisasi. Akibat dari itu semua, sebaliknya globalisasi di negara-negara dunia ketiga telah menciptakan hubungan interdependensi yang sangat kuat. Akibat dari interdependensi tersebut antara lain:

- 1) Pertama, persoalan di bidang perdagangan. Akibat globalisasi, semua negara sepakat dengan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar. Faktanya, *fair trade* yang menjadi prinsip pasar bebas dihalangi oleh berbagai hambatan dan kerumitan. Akibatnya, hanya negara-negara maju yang dapat menikmati keuntungan ekonomi dan perdagangan dewasa ini. Selebihnya, mereka terutama negara-negara dunia ketiga hanya sebagai partisipan penggembira.
- 2) Kedua, persoalan di bidang moneter. Hampir sama dengan perdagangan, stabilitas moneter internasional sebagai prinsip yang disetujui internasional kemudian terhambat oleh ego dan kepentingan negara-negara maju yang tentunya mengorbankan kepentingan negara-negara dunia ketiga.

3) Ketiga, persoalan di bidang produksi global. Masalah jaringan produksi global lintas batas negara dalam suatu perusahaan multinasional merupakan salah satu problem produksi global. Implikasi dari masalah ini adalah menurunnya peran negara dalam melakukan kontrol. Di sisi lain, dalam usaha menambah devisa negara, negara-negara dunia ketiga saling berlomba-lomba menarik investor asing dengan saling memberikan kemudahan investasi. Fenomena ini kemudian dikenal dengan *race to the bottom* yaitu berlomba-lomba menuju kehancuran. Pihak yang paling diuntungkan tentunya para pemilik modal.

Selain itu, isu globalisasi juga terlihat dan berdampak kepada permasalahan kedaulatan negara, terutama pada wilayah perbatasan. Kedaulatan adalah suatu konsep yuridis yang tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Dengan demikian kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena sudah merupakan kebulatan yang utuh. Kadang-kadang isu perbatasan dapat memunculkan konflik yang berkepanjangan dan bahkan menjurus kepada peperangan.

#### d. Demokrasi

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat,

sebab apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Wakil rakyat inilah yang akan memilih dan menentukan pemerintah negara sekaligus yang akan mengatasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Inilah yang disebut dengan Demokrasi Tidak Langsung. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua, yaitu:

- 1). Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan
- 2). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.

Di samping kata demokrasi, dikenal juga istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. demokratisasi merujuk pada proses

terhadap penguasa di Timur Tengah itu bukan murni untuk demokrasi. Banyak kalangan menilai dukungan yang diberikan Amerika itu karena negara adikuasa itu membutuhkan minyak yang ada di Irak, Libya, dan lainnya. Hingga kini, kita sulit memprediksi hasil pergolakan di negara-negara Arab seperti banyak orang tidak bisa mengekspektasi bagaimana Saddam, Ben Ali, Hosni Mubarak dan Khadafi ditumbang. Bisa jadi akan muncul keseimbangan baru yang lebih demokratis. Utamanya melunak sikap terhadap kepentingan negara Barat dan tidak mengganggu eksistensi Israel. Kita berharap negara-negara tersebut bisa melakukan reformasi yang demokratis tanpa kehilangan integritas dan visi, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

## Referensi:

1. Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
2. Dr. Arya Hadi Dharmawan – MK Dinamika Masyarakat Pedesaan PS Sosiologi Pedesaan Pasca Sarjana IPB 2007/2008.
3. <http://roniamirin.blogspot.com/2011/04/demokrasi-indonesia.html>
4. <http://regifauzi.wordpress.com/2011/06/14/isu-isu-global-masa-kini-globalisasi-di-negara-negara-dunia-ketiga/>
5. <http://imsitumeang.wordpress.com/2011/02/02/rembetan-gejolak-di-dunia-arab/>
6. <http://handelmartins.wordpress.com/perkembangan-ilmu-politik-kontemporer-di-indonesia/>
7. <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/kerangka-kerja-sistem-politik-david.html>
8. <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/10/18/mutt2m-imagining-asean-community-2015>
9. <http://blog.uin-malang.ac.id/fityanku/perkembangan-ilmu-zaman-kontemporer/>